

PENGARUH BELANJA PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE INFLUENCE OF PUBLIC SPENDING TO LOCAL ECONOMIC GROWTH IN THE YOGYAKARTA PROVINCE

Ari Mulyanta Ginting

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: arigins2@gmail.com)

Naskah Diterima: 13 Januari 2018, direvisi: 20 Maret 2018,
disetujui: 30 Maret 2018

Abstract

Fiscal decentralization has brought impacts to local government. The increasing fiscal decentralization influences the local government expenditure on public service, including health and education. This essay uses quantitative method to analyze the influence of the increasing public spending to local economic growth in municipalities and districts in the Yogyakarta Province. Panel regression analysis shows that the local government's spending on education sector has a positive and significant influence on local economic growth in each municipalities and districts in the province. Meanwhile the local government's spending on health, although it has a positive influence, it is not significance, either in municipalities or districts in the province. Therefore, this research recommends that the local government should increase its expenditure on education in order to improve economic growth in the region.

Keywords: public spending, economic growth, education and health, fiscal decentralization budget, Yogyakarta Province

Abstrak

Desentralisasi fiskal telah membawa dampak kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan dana desentralisasi fiskal berdampak terhadap peningkatan belanja publik, khususnya belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil analisa regresi panel memperlihatkan bahwa belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, tetapi belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dana desentralisasi fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Rezim Soeharto yang berkuasa sejak tahun 1967 dengan pola pemerintahan sentralistik hingga tahun 1997 cukup lama memerintah di Indonesia. Dampak dari sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut adalah yang semula dipuja-puja pada akhirnya gagal membawa kemakmuran bagi bangsa, negara dan khususnya daerah. Bahkan membawa negara ke jurang kebangkrutan, sehingga dilakukan koreksi total dengan memilih kembali kepada sistem desentralisasi.¹ Salah satu agenda penting setelah reformasi adalah mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selama ini dikeramatkan termasuk di dalamnya adalah amandemen ketentuan yang mengatur tentang desentralisasi. Tujuan utamanya adalah

bangsa dan negara Indonesia tidak mengalami disintegrasi seperti yang terjadi di semenanjung Balkan, seperti Uni Sovyet yang dulu adalah sebuah negara superpower, yang pada Desember 1991 resmi bubar dan pecah menjadi lima belas negara.²

Sebelum otonomi daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku adalah anggaran berimbang, di mana anggaran penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Namun dalam era otonomi daerah, struktur APBD mengacu kepada pendapatan masing-masing daerah struktur APBD-nya berbeda dengan daerah lain tergantung dari kapasitas keuangan yang dimilikinya.³ Belum lagi

¹ Wasistiono Sadu dan Polyando Petrus, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinagor, 2017, hlm. 323.

² Crouch Harold, *Political Reform In Indonesia After Soehato*, Singapura: Institute of SouthEast Asian Studies, 2010, hlm. ix.

³ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21.

ditambah visi dan misi dari kepala daerah masing-masing yang memiliki program yang sangat beragam dan sesuai dengan kepentingan dan arah kebijakan masing-masing.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi yang baru bagi Indonesia. Hal tersebut diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dan terakhir direvisi menjadi Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan otonomi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah sendiri. Kebijakan tersebut diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan terpenting adalah meningkatkan pelayanan kepada publik baik secara kuantitas maupun kualitas.⁴

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah menjadi penting bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan atau visi dan misi dari pemerintah daerah tersebut sehingga sudah seharusnya APBD harus dikelola sedemikian rupa demi terciptanya tujuan pemerintah daerah. Dan salah satu tujuan tersebut adalah bahwa belanja yang dilakukan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, selama tahun 2012-2016 kebijakan transfer fiskal ke daerah diarahkan untuk beberapa tujuan. Ada 5 poin penting yang menjadi tujuan pemberian dana desentralisasi fiskal periode tahun tersebut, diantaranya adalah: (a) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (b) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (c) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (d) meningkatkan sinkronisasi rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; (e) mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terluar dan kepulauan.⁵

Namun desentralisasi fiskal tersebut membawa dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan. Desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh daerah semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya korupsi

para pejabat publik.⁶ Kondisi ini diperparah dengan APBD yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, masih ada sebanyak 131 daerah yang menggunakan dana APBD-nya lebih banyak untuk belanja pegawai dengan rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja berada di angka diatas 50 %.⁷

Kondisi ini cukup memprihatinkan, Barro menemukan bahwa pengeluaran publik merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Barro pada tahun 1990 mengemukakan bahwa fungsi belanja pemerintah harusnya diarahkan sebagai fungsi produksi, di mana setiap penambahan belanja pemerintah dapat meningkatkan *output* produksi dari suatu negara, sehingga setiap rupiah belanja pemerintah harus alokasikan kepada belanja produktif yang dapat mendorong perekonomian.⁸

Shua-Chen dan Jang-Ting Guo melakukan penelitian tentang *endogenous growth model* antara konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa investasi publik atau belanja publik menjadi faktor determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi dampak dari pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda efeknya untuk masing-masing negara.⁹

Lebih lanjut Mangkoesoebroto mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pembangunan ekonomi khususnya pada tahap awal perkembangan ekonomi dibutuhkan peran pemerintah yang sangat besar. Peran pemerintah pada tahap awal dibutuhkan untuk belanja publik untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Belanja tersebut khususnya diberikan kepada sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasana transportasi dan sebagainya yang mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat.¹⁰ Pemerintah daerah dalam hal ini baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah selayaknya mengarahkan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah kepada alokasi

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan dan RAPBN 2017*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016, hlm. IV.5-1.

⁶ Joko Tri Haryanto, "Desentralisasi Fiskal Seutuhnya", (*online*), (<http://kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>), diakses 31 Maret 2017).

⁷ "Ini Daftar Daerah dengan APBD yang Banyak Habis Untuk Gaji PNS", (*online*), (<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3427718/ini-daftar-daerah-dengan-apbd-yang-banyak-habis-untuk-gaji-pns>), diakses 21 Februari 2017)

⁸ Robert J. Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", *Journal of Political Economy*, Vol.20, No. 1, hlm. 465-490.

⁹ Chen, Shu-Hua dan Guo, Jang-Ting, "Progressive Taxation, Endogenous Growth, and Macroeconomic (in) Stability.", *Buletin of Economic Research*, Vol. 68(1), December 2016, hlm. 20-27.

¹⁰ Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 170.

proporsi yang lebih besar kepada belanja publik. Hal ini dikarenakan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah daerah dapat mencukupi dan memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan publik dasar.

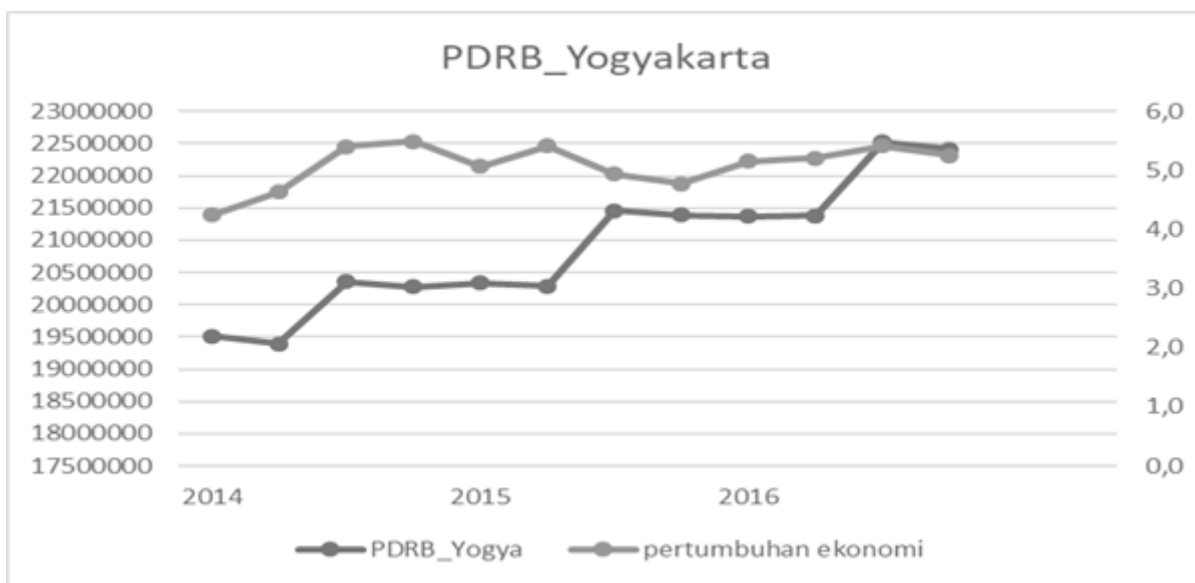
Salah satu pemerintah daerah yang memiliki pelayanan publik terbaik adalah Provinsi Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Tujuan dari pemerintah daerah adalah pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan pendataan dan rekomendasi dari masyarakat. Penilaian meliputi standar pelayanan, prosedur pelayanan, dan survei kepuasan pelayanan dari masyarakat selaku pengguna.¹¹ Sehingga diharapkan dengan patuhnya akan standar akan pelayanan publik dapat mendorong percepatan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan sub-sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas dan urusan antara pusat dan daerah. Menurut Ahmad Yani, pemberian sumber keuangan negara kepada kepala

nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Pemberian keuangan ini dalam pelaksanaan desentralisasi merupakan inti dari kebijakan desentralisasi fiskal.¹²

Desentralisasi fiskal yang telah terwujud dalam bentuk pemberian kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasi dana desentralisasi fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diserahkan. Diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom berdasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat dan diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah benar-benar memenuhi prinsip efektif dan efisien.¹³

Mardiasmo menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik



Sumber : BPS (2018)

Gambar 1. Perkembangan PDRB Provinsi Yogyakarta atas dasar Harga Konstan Periode tahun 2014-2017 daerah dilakukan dengan pelaksanaan desentralisasi dengan memerhatikan stabilitas perekonomian

¹¹ "Yogyakarta sandang predikat kota pelayanan publik terbaik", (*online*). (<http://www.antaranews.com/berita/615576/yogyakarta-sandang-predikat-kota-pelayanan-publik-terbaik>, diakses tanggal 3 April 2017).

¹² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkarasa. 2008, hlm. 42.

¹³ Anggito Abimanyu, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2005.

ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.¹⁴

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa perkembangan PDRB Provinsi Yogyakarta secara total dari 5 kabupaten dan kota yang ada mengalami tren positif setiap tahunnya. Hal yang sama juga terlihat dari peningkatan PDRB yang membentuk pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini salah satu faktor determinasi adalah berasal dari pemerintah daerah. Menurut Didin dan Imamudin mengatakan bahwa faktor determinasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta salah satunya adalah berasal dari belanja pemerintah daerah yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.¹⁵ Faktor belanja pemerintah daerah menjadi penting untuk dilihat lebih lanjut pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah Schultz melakukan penelitian tentang pentingnya investasi pada peningkatan sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹⁶ Lebih lanjut Maitra dan Mukhopadhyay pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang pengaruh belanja sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sampel 12 negara. Penelitian tersebut menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) model dengan periode tahun 1981 sampai dengan 2011 menemukan hasil bahwa belanja publik sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di hampir 90 persen negara yang diteliti dan sisanya memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan.¹⁷

Senada dengan penelitian di atas, Khan pada tahun 2005 melakukan penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menerapkan data *cross-sectional* dari 72 negara berpendapatan

rendah sampai menengah periode tahun 1980 sampai dengan tahun 2002.¹⁸ Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa semakin meningkat sumber daya manusia semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tamang meneliti pengaruh belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi India dengan menggunakan *Johansen cointegration*. Dengan menggunakan data tahun dari tahun 1980 sampai dengan 2008 menemukan bahwa 1 persen kenaikan belanja pendidikan akan mendorong 0,11 persen pertumbuhan ekonomi.¹⁹

Nur Saidah melakukan penelitian terhadap 22 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera tentang analisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di sana. Dengan menggunakan *random effect model EGLS weight cross-section SUR* menemukan hasil bahwa belanja publik khusus belanja fungsi kesehatan dan pendidikan hanya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kajian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan rujukan variabel di atas dengan fokus kajian adalah sebagai berikut yaitu bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dan berikutnya adalah bagaimana pengaruh belanja publik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi D. I. Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *mix method* yaitu menggunakan dua pendekatan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan. Pendekatan yang dipakai yaitu metode metode kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab permasalahan penelitian di atas. Dalam konteks penelitian ini maka yang akan diangkat dan disajikan adalah tentang pengaruh pengeluaran belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan *mix method* dilakukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan kuantitatif dilakukan

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 6-7.

¹⁵ Wahyudin, Didin dan Yuliadi, Imamudin, "Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 14(2), Oktober 2013, hlm. 120-126.

¹⁶ Theodore W Schultz, "Investment in human capital", *The American Economic Review*, Vol. 51, No. 1, 1961, Hlm. 1-17.

¹⁷ Biswajid Maitra dan C.K. Mukhopadhyay, "Public Spending on education, health care and economic growth in selected countries of Asia and the Pasific" *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 19, No. 2, 2012, hlm. 19-48.

¹⁸ Mohsin Khan, "Human Capital and Economic Growth in Pakistan" *The Pakistan Development Review*, Vol.44, No. 4, 2005, hlm.445-478.

¹⁹ Pravesh Tamang, "The impact of education expenditure on India's economic growth", *Journal of International Academic Research*, Vol. 30, No. 2, 2011, hlm. 493-504.

²⁰ Nur Saidah, "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal", *Skripsi*, Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, 2011

sebelum dilakukan penelitian ke lapangan, lalu diikuti dengan penelitian ke lapangan untuk melakukan pendekatan kualitatif untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil pendekatan kuantitatif yang telah dilakukan. Sehingga dengan menggunakan *mix method*, diharapkan didapatkan hasil penelitian yang lebih kaya akan informasi, gagasan dan wawasan mengenai pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Teknis Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui serangkaian teknik pengumpulan data di atas akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama adalah analisis dengan metode kualitatif, ada tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Reduksi data dilakukan agar data yang berasal dari berbagai sumber tersebut dapat dipahami. Oleh karena itu dalam reduksi data ini, peneliti berupaya melakukan *editing* dan kategorisasi data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dan penarikan simpulan. Data-data seperti belanja atau pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan merupakan rasio pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang didapatkan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tahapan kemudian adalah dilakukan analisa kuantitatif terhadap permasalahan penelitian mengenai pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis regresi berganda dari variabel yang ada terkait pengeluaran belanja publik yang telah dikeluarkan oleh daerah untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada bagian pembahasan dan analisis akan dibahas secara lengkap dan jelas prosedur analisa kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dan dilaporkan hasil dari analisis regresi tersebut.

Metode Estimasi

Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi panel data. Estimasi panel data adalah estimasi yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*. Salah satu tujuan menggunakan estimasi panel menurut Baltagi yaitu dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel independen, sehingga analisis lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang

mendekati realita. Dalam estimasi panel data, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*. Untuk memilih antara pendekatan *common effects* dan *fixed effects* digunakan Uji F.²¹

Rumus Uji F yang digunakan adalah
$$F = F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{(1 - R^2_{UR}) / (n-k)}$$

, dimana R^2_{UR} adalah R^2 untuk *fixed effects*, R^2_R adalah R^2 untuk *common effects*, m adalah jumlah restriksi, n adalah banyaknya observasi dan k adalah jumlah parameter dalam *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *common effects* dan H_a : *fixed effects*. Sedangkan untuk memilih antara pendekatan *fixed effects* dan *random effects* digunakan Uji Hausman. Di mana hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *random effects* dan H_a : *fixed effects*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menganalisis pengaruh tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *production function* yang didasarkan kepada penelitian Mankiw, Romer dan Weil tentang model pertumbuhan ekonomi. Model tersebut diformulasikan sebagai berikut²² :

$$Y_t = A_t K_t^\alpha H_t^\beta L_t^{1-\alpha-\beta} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana Y adalah output, K adalah investasi modal, H adalah *human capital*, dan L adalah tenaga kerja. Investasi modal yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu investasi belanja publik dan investasi lainnya.

Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maitra dan Mukhopadhyay namun dengan beberapa perubahan sesuai dengan tujuan penelitian. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan metode analisa yang digunakan dan perubahan dalam objek penelitian yang diteliti. Sehingga model regresi panel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\ln Y_t = C + \alpha \ln K_t + \beta \ln H_{edut} + \theta \ln H_{health} + \gamma \ln L_t + u \dots\dots\dots(2)$$

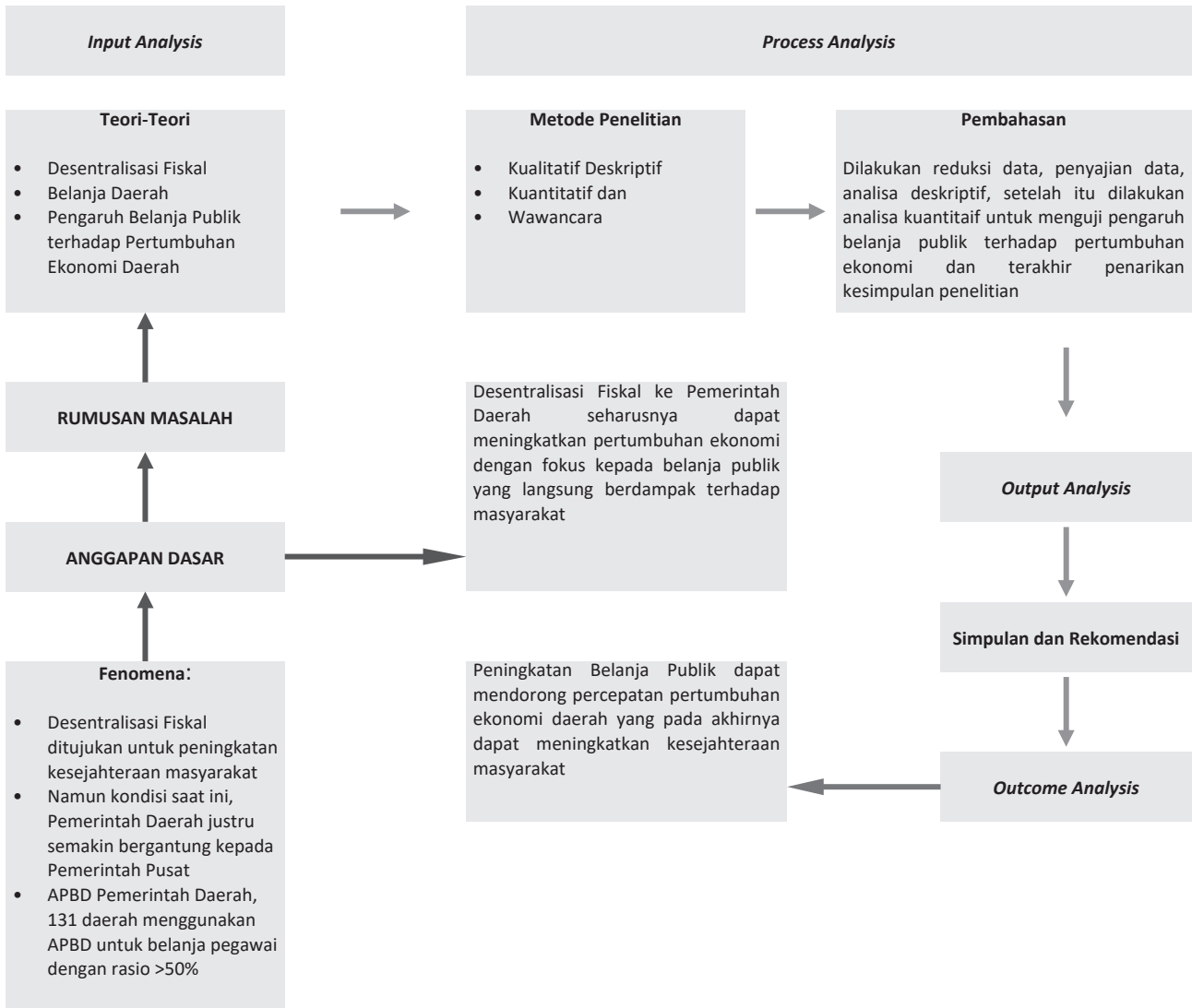
Dimana, Ln Y adalah pertumbuhan ekonomi daerah, C adalah konstanta, γ adalah $(1 - \alpha - \beta)$, Ln K adalah pertumbuhan modal investasi swasta, Ln L adalah pertumbuhan tenaga kerja, Ln H adalah pertumbuhan investasi pada sumber daya manusia, di mana pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu

²¹ Badi H. Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Son, 2005.
²² Gregory N. Mankiw, David Romer dan David N. Well, "A contribution to the empirics of economic growth", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2, 1992, hlm. 407-437.

investasi pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan investasi pada sektor kesehatan. Secara teoritis diharapkan bahwa tanda estimasi regresi diharapkan positif. Artinya setiap penambahan belanja publik baik pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

dari proporsi industri pengolahan, 10,70% berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan, 10,24 penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Jika dibandingkan secara regional dengan kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tahun yang sama sebesar 5,56% per tahun.

KERANGKA PEMIKIRAN



HASIL DAN PEMBAHASAN

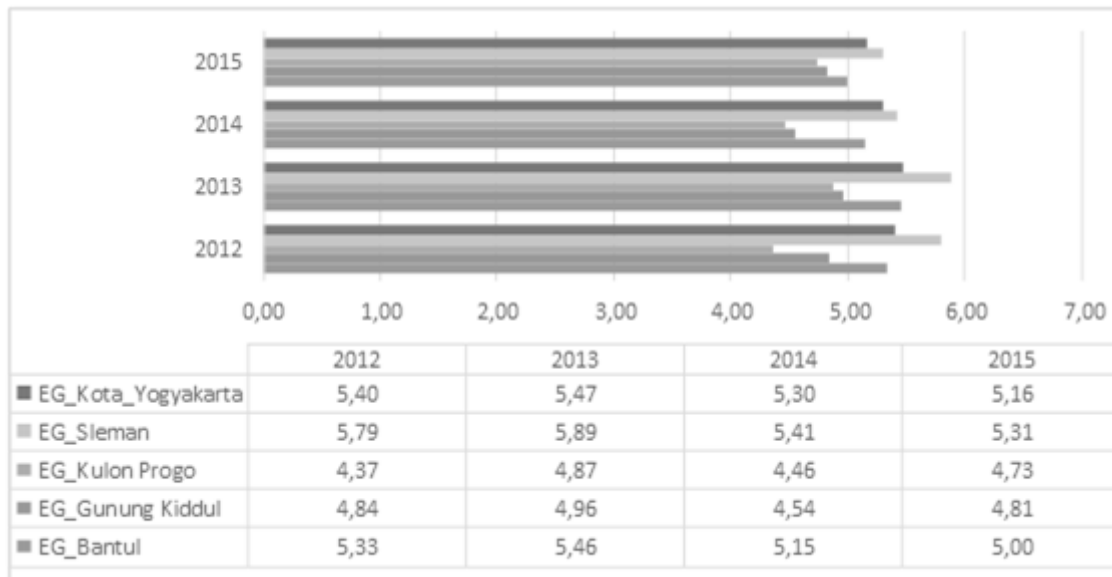
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten dan kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 2. secara umum pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 5,23% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta ini disumbang 3 sektor lapangan usaha yang utama, yaitu yang pertama adalah sebesar 13,05% berasal

Sedangkan pertumbuhan ekonomi periode tahun yang sama dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 4,54%.

Analisa Pengaruh Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada bagian berikut akan dilakukan analisa regresi panel data terhadap pengaruh belanja publik khususnya sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten/



Sumber : Data diolah (2018).

Gambar. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi. D.I. Yogyakarta Periode tahun 2011-2015.

kota. Langkah awal sebelum melakukan regresi panel data adalah melakukan uji spesifikasi model data panel. Uji spesifikasi model data panel yang dilakukan terdiri dari uji Chow untuk menentukan apakah regresi panel data dengan menggunakan *fixed effect* atau *common effect*. Nilai Chow diperoleh dari hasil regresi dengan bantuan program *eviews 9.0*. Uji Chow dengan menggunakan *redundant test*. Hasil *redundant fixed effect test-likelihood ratio* dapat dilihat pada tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	795.136326	(4,17)	0.0000
Cross-section Chi-square	130.923134	4	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018).

Berdasarkan hasil uji Chow di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chisquare*-nya lebih kecil dari pada tingkat signifikansi level yaitu 5%, maka H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi data panel menggunakan model *fixed effect*.

Kemudian dilakukan uji Hausman untuk menentukan manakah yang lebih tepat menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*. Uji Hausman memiliki H_0 adalah *random effect model*. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel 2 dibawah.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.371062	3	0.0001

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018).

Berdasarkan hasil uji Hausman di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,0001 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, maka model regresi data panel yang tepat adalah menggunakan *fixed effect model*.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan regresi panel data dengan menggunakan *fixed effect model*. Hasil analisa regresi panel data dengan menggunakan bantuan program *eviews 9.0* dapat dilihat pada tabel 3. dibawah.

Tabel 3. Hasil Regresi Panel

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
C	0,405905	2,408	0,025
EDUC	0,895	2,530	0,047
HEALTH	0,521	1,230	0,235
INVESTASI	1,111996	35,10	0,000
Fixed Effects (Cross)			
Bantul	0,1450		
Gunung Kidul	0,0778		
Kulon Progo	0,0379		
Sleman	0,2995		
Kota Yogyakarta	0,0346		
R ²	0,7817		
Adj-R ²	0,690		
F	357,30		
Prob(F-Stat)	0,0000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018).

Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa uji F dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka signifikan secara statistik dengan nilai probabilitas (F -statistik) = $0,000 < \text{tingkat signifikansi } (\alpha=0,05)$. Hasil ini berarti secara bersama-sama variabel independen dalam model secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Nilai R^2 *adjusted* sebesar 0,690 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman atau variasi variabel dependen sebesar 69%.

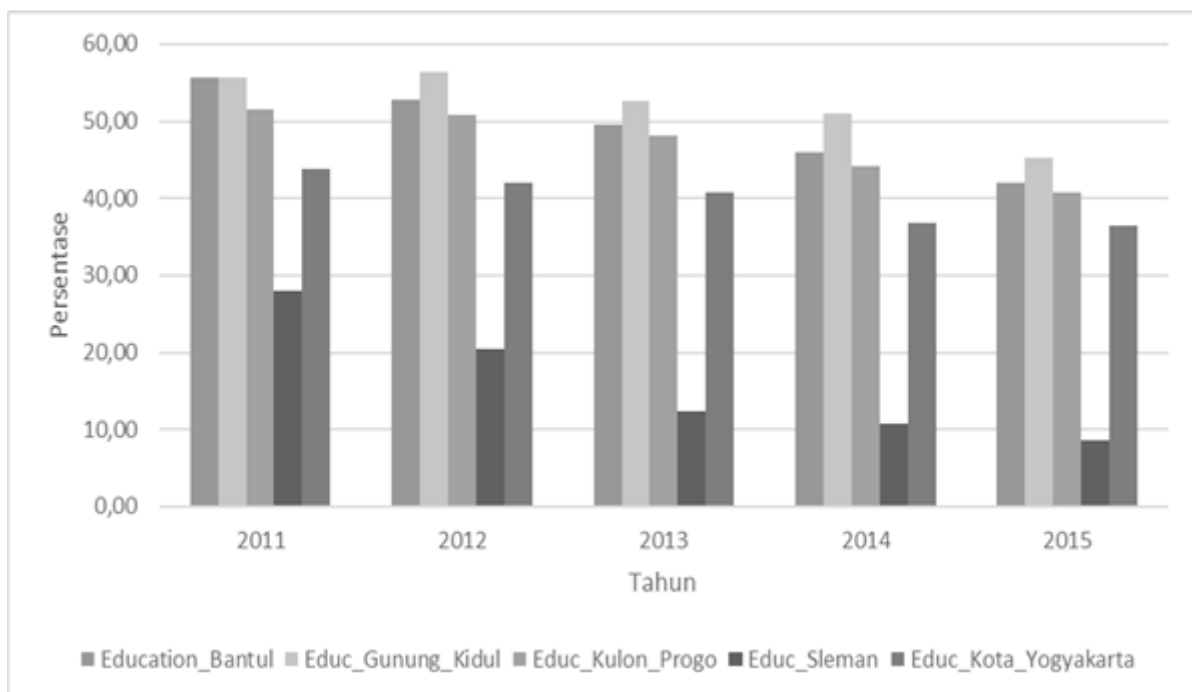
Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dalam hal ini fokus kepada belanja sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan regresi panel. Berdasarkan hasil regresi panel data didapatkan koefisien dari variabel belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebesar 0,895 dan secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Variabel

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil analisa regresi panel seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pengaruh belanja pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Todaro²³, Hongyi-Li dan Huang-Liang²⁴ dan Monday *et al.*²⁵ yang berpendapat bahwa setiap peningkatan pengeluaran sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Proporsi belanja pendidikan di kota dan kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan kondisi yang beragam. Berdasarkan periode penelitian tahun 2011-2015, proporsi belanja pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul memiliki proporsi terbesar, diikuti oleh Kabupaten Bantul.



Sumber : Data diolah (2018).

Gambar 3. Proporsi Belanja Pendidikan Kota/Kabupaten Provinsi D.I. Yogyakarta

pertumbuhan investasi memiliki nilai koefisien sebesar 1,111996 dan secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada saat yang bersamaan, variabel pertumbuhan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan variabel belanja kesehatan memiliki koefisien sebesar 0,521 dan tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat diartikan bahwa belanja kesehatan tidak memiliki

²³ Michael P. Todaro, and Stephen C. Smith, *Economic Development 8th Edition*. United Kingdom: Pearson and Addison Wesley, 2006.

²⁴ Hongyi-Li and Huang-Liang, "Health, education and Economic Growth in East Asia", *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, Vol.3, No. 2, 2011, hlm. 110-131.

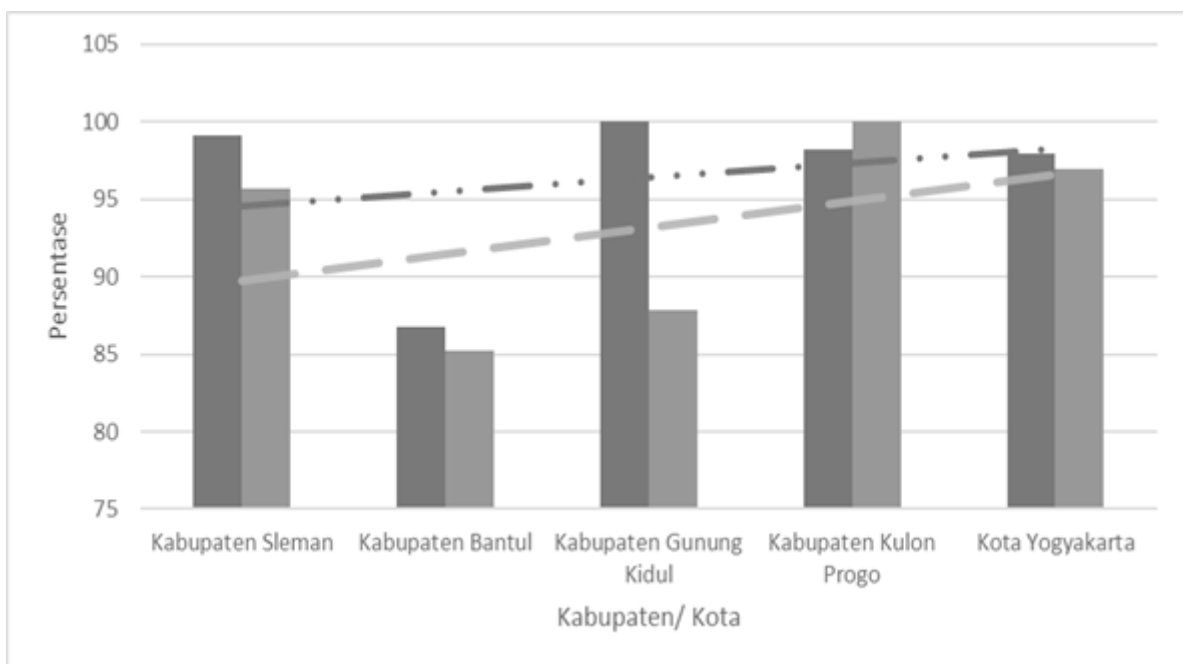
²⁵ Robison Monday Olulu, Eravwoke Kester Erhieyovwe and Ukavwe Andrew, "Government Expenditure and Economic Growth: The Nigerian Experience", *Mediterranean Journal of Social and Sciences*, Vol. 5, No. 10, 2014, hlm. 89-95.

Kabupaten Gunung Kidul memiliki rata-rata proporsi belanja fungsi pendidikan dibandingkan belanja total selama periode 2011-2015 adalah sebesar 52,23% sementara itu rata-rata proporsi belanja pendidikan Kabupaten Bantul pada periode yang sama adalah sebesar 49,21%. Sementara itu proporsi belanja pendidikan dibandingkan belanja total kabupaten/kota terkecil terdapat pada Kabupaten Sleman, dengan nilai proporsi rata-rata selama periode penelitian adalah sebesar 16,08%. Gambaran lengkap proporsi belanja pendidikan di kabupaten dan kota pada Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 3.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Semakin bagus kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan akses utama untuk menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumber daya manusia (SDM). Semakin banyak tercipta SDM yang berkualitas di suatu daerah, maka hal ini dapat menjadi kunci sebagai aset pembangunan

Hasil regresi panel data yang menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan berbagai capaian kemajuan pendidikan yang telah dicapai oleh Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil ini dapat dilihat dan nampak dari angka partisipasi sekolah (APS) yang mengalami peningkatan secara signifikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan di D. I. Yogyakarta maka semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Hal ini menggambarkan masih kurang partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Partisipasi sekolah untuk tingkat SD dan SMP sudah cukup tinggi dan merata untuk setiap kabupaten dan kota (lihat Gambar 4.). Berdasarkan APS di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015, program pendidikan SD usia 7-12 tahun sudah tercapai 100% di Kabupaten Bantul, sedangkan angka partisipasi sekolah program pendidikan usia 13-15 sudah tercapai 100% di Kabupaten Kulon Progo. Rata-rata APS Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 96,43% untuk usia 7-12 tahun dan 93,17% untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki APS pendidikan terendah adalah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 86,77%, artinya masih ada 13,23% anak usia 7-13 tahun yang tidak bersekolah.



Sumber : Data diolah (2018).

Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2015 (Persen)

daerah tersebut. Berkaitan dengan aspek pendidikan, Provinsi D.I. Yogyakarta secara keseluruhan termasuk semua kabupaten/kota menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan.²⁶

Salah satu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta yang melakukan terobosan dalam sektor pendidikan adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dinas pendidikan kota telah melakukan beberapa terobosan dan inovasi untuk meningkatkan mutu dan SDM masyarakat di Kota Yogyakarta. Beberapa

²⁶ Hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2017.

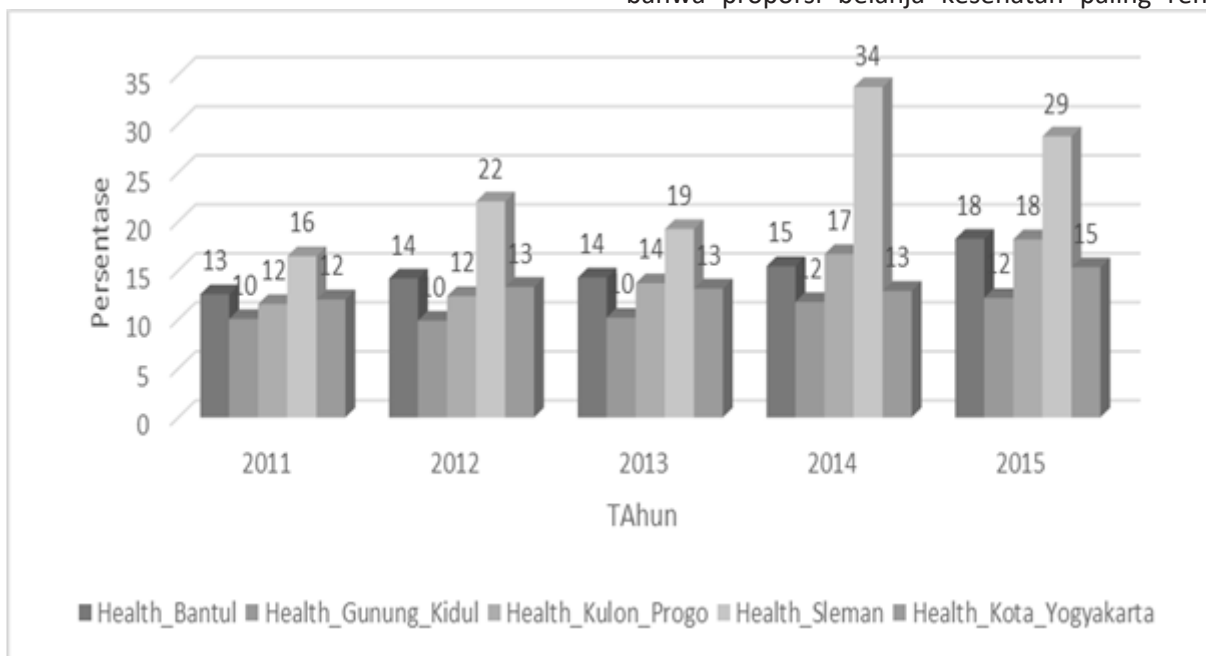
inovasi dan terobosan tersebut adalah antara lain gratis biaya pendidikan untuk SD sampai dengan SMP khusus kepada warga kurang mampu. Registrasi *online* kedua di Indonesia bagi pelajar yang ingin memasuki naik tingkat dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMU. Serta adanya aplikasi *online* khusus bagi siswa yang ingin diskusi mengenai mata pelajaran yang dianggap sulit dan akan dijawab oleh guru-guru yang handal.²⁷

Belanja Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil regresi panel data di atas menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun hasil ini secara statistik tidak signifikan. Hasil regresi panel ini tidak dapat diinterpretasi sebagai setiap peningkatan belanja kesehatan di kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota karena secara statistik tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald dan Shuangling tahun 1993. Penelitian tersebut dengan menggunakan data dari 58 negara di Asia ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.²⁸

Hasil regresi panel yang menemukan bahwa hubungan antara belanja sektor kesehatan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun tidak signifikan. Hal ini dapat berasal dari angka besaran belanja kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih relatif kecil. Sebagai contoh adalah Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki proporsi belanja kesehatan rata-rata hanya sekitar 11% dari keseluruhan belanja. Belanja kesehatan yang kecil tentu berdampak terhadap peningkatan pelayanan kesehatan yang juga kecil. Sehingga hasil kontribusi belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi positif namun tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi proporsi belanja kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Gambar 5. Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan proporsi belanja kesehatan tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sedangkan Kabupaten Gunung Kidul menjadi Kabupaten dengan proporsi belanja terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Proporsi Belanja kesehatan di Kabupaten Klaten periode tahun 2011-2015 menjadi kabupaten/kota dengan proporsi belanja terbesar dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Gambar 4 juga didapatkan informasi bahwa proporsi belanja kesehatan paling rendah



Sumber : Data diolah (2018).

Gambar 5. Proporsi Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi. D.I. Yogyakarta

²⁷ Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tanggal 11 Juni 2017.

²⁸ Donald N Baum and Shangling Lin, "The differential Effect on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defence" *Journal of Economic Development*, Vol. 18, No. 1, 1993, hlm. 175-185.

berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kota Yogyakarta justru menjadi peringkat ketiga dari proporsi belanja sektor kesehatan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Perkembangan belanja kesehatan Kota Yogyakarta periode tahun 2012-2017 mengalami perkembangan tren yang meningkat. Jika pada tahun 2012 belanja dinas kesehatan Kota Yogyakarta sebesar Rp 83 Miliar mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 291 miliar. Proporsi belanja dinas kesehatan lebih banyak didominasi oleh belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Dan persentase anggaran kesehatan APBD terhadap APBD kota Yogyakarta tidak termasuk gaji pegawai mulai tahun 2014 sudah berada di atas 10 persen.²⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Desentralisasi fiskal membawa dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola kebijakan anggaran masing-masing daerah. Namun sejalan dengan prinsip desentralisasi itu sendiri adalah mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, hal ini didasarkan bahwa pemerintah daerahlah yang lebih dekat dan mengetahui permasalahan masyarakat khususnya pelayanan publik. Oleh karena itu belanja publik menjadi salah satu faktor penting dalam keuangan pemerintah daerah khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja publik yang baik khususnya sektor kesehatan dan pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesehatan dan peningkatan aspek SDM di daerah. Penelitian ini fokus kepada daerah, yaitu kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel pertumbuhan pengeluaran di seluruh kabupaten/kota di Provinsi D. I. Yogyakarta khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta.

Belanja sektor pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari proporsi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi D. I. Yogyakarta yang cukup tinggi di sektor pendidikan. Peningkatan belanja pendidikan berarti meningkatkan SDM dan peningkatan SDM berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang berada selalu diatas 5%. Sementara itu belanja sektor kesehatan berdasarkan hasil regresi panel baik untuk kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja kesehatan yang tidak signifikan tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan cara peningkatan besaran dan kualitas belanja kesehatan tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan data dari kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, belanja publik khususnya belanja sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja di sektor pendidikan berarti meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Peningkatan kualitas pendidikan berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM yang ada di daerah.

Desentralisasi fiskal membawa dampak terhadap keleluasan daerah untuk menentukan arah belanja dan fokus alokasi APBD setiap tahunnya. Maka sudah waktunya bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Hal ini dikarenakan SDM merupakan kunci dari peningkatan dan keberlangsungan proses terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Tanpa adanya SDM yang unggul dan memiliki kompetensi dan kapasitas jangan harap daerah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan besaran dan kualitas belanja sektor kesehatan dan pendidikan dapat menjadi salah satu kunci peningkatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abimanyu, Anggito. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd ed. Chicester : John Wiley & Son.
- Harold, Crouch. (2010). *Political Reform In Indonesia After Soehato*. Singapura: Institute of SouthEast Asian Studies.
- Mangkoessoebroto, Guritno. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

²⁹ Hasil Diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2017.

- Sadu, Wasistiono dan Petrus, Polyando. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinagor.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006). *Economic Development 8th Edition*. United Kingdom: Pearson and Addison Wesley.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkarasa.
- Tamang, Pravesh. (2011). The impact of education expenditure on India's economic growth. *Journal of International Academic Research*. Vol. 30(2). Hlm. 493-504.
- Schultz, Theodore W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*. Vol. 51. (1). Hlm. 1-17.
- Wahyudin, Didin dan Yuliadi, Imamudin. (2013). "Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 14(2), Oktober, hlm. 120-126.

Artikel dalam jurnal atau majalah

- Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*. Vol.20(1). Hlm. 465-490.
- Baum Donald N and Lin, Shangling. (1993). The differential Effect on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defence. *Journal of Economic Development*. Vol. 18(1). Page. 175-185.
- Chen, Shu-Hua dan Guo, Jang-Ting. (2016). "Progresive Taxation, Endogenous Growth, and Macroeconomic (in) Stability:," *Buletin of Economic Research*, Vol. 68(1), December, hlm. 20-27.
- Hongyi-Li and Huang-Liang. (2011). Health, education and Economic Growth in East Asia. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*. Vol.3(2). Page 110-131.
- Khan, Mohsin. (2005). Human Capital and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*. Vol.44(4). Hlm.445-478.
- Maitra, Biswajid dan Mukhopodhyay, C.K.. (2012). Public Spending on education, health care and economic growth in selected countries of Asia and the Pasific. *Asia-Pacific Development Journal*. Vol. 19(2). Hlm. 19-48.
- Mankiw, Gregory N., Romer, David dan Well, David N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quartery Journal of Economics*. Vol. 107(2). Hlm. 407-437.
- Olulu, Robison Monday., Erhieyovwe, Eravwoke Kester., and Andrew, Ukavwe. (2014). Government Expenditure and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social and Sciences*. Vol. 5(10). Page 89-95.

Dokumen Resmi

- Kementerian Keuangan. (2016). *Nota Keuangan dan RAPBN 2017*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Saidah, Nur. (2011). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal. *Skripsi*. Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.

Makalah seminar

- Fathurrohman, Enril Yusuf. (2016). Peran Media Sosial Sebagai Ujung Tombak Bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM), makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Pertanian, Universitas Brawijaya.

Internet

- Ini Daftar Daerah dengan APBD yang Banyak Habis Untuk Gaji PNS. (*online*), (<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3427718/ini-daftar-daerah-dengan-apbd-yang-banyak-habis-untuk-gaji-pns>, diakses 21 Februari 2017)
- Haryanto, Joko Tri. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. (*online*), (<http://kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>, diakses 31 Maret 2017).
- Yogyakarta sandang predikat kota pelayanan publik terbaik, (*online*). (<http://www.antaraneews.com/berita/615576/yogyakarta-sandang-predikat-kota-pelayanan-publik-terbaik>, diakses tanggal 3 April 2017).